

Determinan penerapan *good governance* pada pemerintah daerah Kota Bima

Imam Darmawan*, Ovriyadin, Nafisah Nurulrahmatiah, Marsya Humairah, Reza Fitriani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: imamdarmawan.stiebima@gmail.com)

Abstract

This research aims to determine the factors that influence the implementation of Good Governance in the Bima City regional government. This research uses a quantitative approach method by distributing questionnaires. The population in this research is all 34 SKPDs in Bima City. The sampling technique used is Judgment Sampling (selection of samples based on considerations) in determining the sample, a non-random type of sample selection where the information obtained is generally adjusted to the research objectives or problems. In this research, the samples taken were all elements of the leadership of each Bima City SKPD, with considerations directly related to policy formulation and regional financial management. So, the sample in this study was 102 respondents. The data analysis tool uses Smart PLS. This research provides information that the Application of Information Technology, Quality of Human Resources, and Internal Control Systems influence the Implementation of Good Governance in the Bima City government. Likewise, implementing good governance affects the quality of financial reports in the Bima City government.

Keywords: IT Application, HR Quality, Internal Control Systems, Good Governance, Financial Report Quality

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penerapan Good Governance pada pemerintah daerah Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Bima sebanyak 34. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Judgement Sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) dalam menentukan sampel, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah seluruh unsur pimpinan masing-masing SKPD Kota Bima, dengan pertimbangan berkaitan langsung dengan penyusun kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 102 responden. Alat analisis data menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa Penerapan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* pada pemerintah Kota Bima. begitu pula dengan Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah Kota Bima.

Kata kunci: Penerapan TI, Kualitas Sumber Daya Manusia, sistem pengendalian internal, Good Governance, Kualitas Laporan Keuangan

How to cite: Darmawan, I., Ovriyadin, O., Nurulrahmatiah, N., Juliana, A., & Nuraini, R. I. (2024). Determinan penerapan good governance pada pemerintah daerah Kota Bima. *Journal of Management and Digital Business*, 4(3), 601–614. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i3.1238>



1. Pendahuluan

Perubahan dan perbaikan kualitas kinerja pemerintah diperlukan untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Untuk menjawab perubahan dan perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih baik, maka Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan *Good Governance* pada pengelolaannya. Karena Penyelenggaraan Pemerintahan secara baik (*good-governance*) dan bersih (*cleangovernment*) tentunya berimplikasi terhadap kompetensi aparatur yang dimensinya mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur Kehandalan dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Terbaikannya unsur Kehandalan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Segara, 2017). Birokrasi pemerintah harus dijalankan dengan semangat profesionalitas yang tinggi yaitu oleh orang-orang yang memiliki kehandalan dalam pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan maksimal guna tercapainya *Good Governance* (Mulyati, 2012).

Good governance dapat diartikan bahwa pemerintahan dijalankan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dengan menyatupadukan tiga pilar utama pelaku *good governance* yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat (*state, private sector and society*) (Haelin, 2020). Namun kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat inipun pengelolaan pemerintah belum benar-benar menyatukan prinsip negara, dunia usaha dan masyarakat secara adil, terutama pada lingkup pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari kasus korupsi yang selalu terjadi setiap tahun, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah, serta permasalahan pelayanan yang berlarut-larut. Akibatnya penerapan *good governance* dirasa belum secara utuh terlaksana (Tomuka, 2013).

Kota Bima selama sepuluh tahun terakhir dari 2015-2024 telah mendapatkan predikat WTP dalam penyusunan laporan keuangan daerah oleh BPK. Namun dalam praktek yang sesungguhnya apakah predikat ini sejalan dengan kepatuhan pelayanan publik yang diberikan. Dari data yang di keluarkan oleh ombudsman, pada tahun 2024 Kota Bima meraih penghargaan pelayanan publik kualitas tinggi dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, namun hal ini tidak sejalan dengan inovasi dan perbaikan tata kelola pemerintah, yaitu berupa pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Karena dari sumber yang sama mengatakan bahwa birokrasi di NTB salah satunya Kota Bima belum keluar dari zona nyaman cara-cara manual. Salah satu dampaknya adalah maladministrasi berupa pelayanan berlaut-larut. Maladministrasi ini menempati urutan teratas yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Hal ini terjadi karena minimnya inovasi di kota/kabupaten se-NTB dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Layanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah daerah tercermin dari pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk menjamin layanan yang diberikan kepada publik

telah sesuai dengan rencana, maka pemerintah daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai dengan tuntutan PP No. 60/2008. Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan dengan baik akan membantu mengurangi agency problem dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga tercapainya *good governance* (Haelin, 2020).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Destriyani, 2015). Sumber daya manusia perlu dikelola, diatur dan dimanfaatkan agar dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi, karena merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi (Suharto, 2012). Salah satu fungsi utama SKPD adalah memberikan pelayanan publik, sehingga diperlukan aparatur pemerintahan yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan mendukung kegiatan operasional instansi pemerintah. Pelayanan publik yang berjalan dengan baik menandakan bahwa *good governance* telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain kualitas kinerja pegawai, faktor lain yang secara empiris dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip GGG adalah teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai pondasi dari kapabilitas teknologi informasi, yang mencakup seluruh instansi termasuk instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan yang dapat dipercaya dan disediakan oleh kelompok sistem informasi (Weill et al., 2016). Ketersediaan teknologi informasi tidak hanya dapat berpengaruh pada kelancaran tugas pegawai, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja dan pada gilirannya berdampak pada upaya penerapan prinsip-prinsip GGG (Farnita & Junaidi, 2020).

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Informasi terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dari kualitas laporan keuangan daerah yang disusun oleh tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas laporan keuangan dikatakan baik ketika disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku dan telah melalui proses pemeriksaan dan dinilai oleh auditor pemerintah yang dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Muis et al., 2014).

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance* sebelumnya telah dilakukan oleh Sari et al., (2017), Haura et al., (2019) dan Pituringsih et al., (2020). Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti

terdahulu masih kurang meneliti terkait faktor-faktor langsung atau Determinan Penerapan *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan sistem Pengendalian Intern terhadap Penerapan *Good Governance* serta untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.

2. Tinjauan Pustaka

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku manajerial, merancang sistem insentif dan pengawasan yang efektif, serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penerapan teori *stewardship* dalam konteks akuntansi mengimplikasikan bahwa manajemen harus bertindak sebagai pengurus yang bertanggung jawab dan transparan terhadap para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Pituringasih et al., 2020). *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik, seperti lembaga pemerintahan dan *non-profit* lainnya. Teori *stewardship* sering dikenal sebagai teori pengelolaan atau. Sejak awal kemunculannya, akuntansi dalam organisasi sektor publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mendukung hubungan antara *stewards* dengan *principals* (Wilson, 2010).

Mardiasmo (2009) menjelaskan akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Tujuan utama akuntansi sektor publik bukan untuk memaksimalkan laba tetapi memberikan layanan publik (*public service*). Organisasi sektor publik merupakan organisasi dengan basis *nonprofit oriented*. Organisasi sektor publik terutama pemerintah pusat maupun daerah mengelola uang negara untuk digunakan sebaik mungkin demi kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola tata kelola pemerintahannya yang diwujudkan dengan prinsip *good governance* (Sari et al., 2017).

Penerapan *Good Governance*

Good Governance dapat diartikan sebagai suatu mekanisme atau proses yang bertujuan untuk mencapai perbaikan melalui pengaturan hubungan antara birokrasi dan lembaga di luar pemerintah, termasuk masyarakatnya. Keterlibatan pemangku kepentingan di dalam birokrasi sangatlah penting karena mereka memiliki kompetensi yang dapat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Rahman, 2018).

Pemerintah dianggap baik apabila mampu mengelola sumber daya dengan efektif untuk mengatasi berbagai masalah, serta memberikan layanan berkualitas secara efisien kepada masyarakat (Kalsi & Kiran, 2015). Zeyn, (2011) mengemukakan bahwa *good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem

pengendalian yang dapat dipercaya, serta pemerintahan yang bertanggungjawab (akuntabel) pada publiknya. *Good governance* harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah legislatif dan pengawasan, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga pada lembaga-lembaga non struktural. Untuk menciptakan sistem birokrasi yang baik, pemerintah telah mengambil langkah-langkah agar *good governance* diterapkan di lingkungan pegawai negeri sipil, khususnya bagi mereka yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik. Setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas *good governance* diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Terdapat sembilan prinsip atau karakteristik *good governance* 1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; (8) *accountability*; (9) *strategy vision* (Osborne dan Geabler, 1992).

Penerapan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Armel et al., 2017).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik (Nurmiati, 2017).

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Dalam instansi pemerintahan, untuk menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan LKPD yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan yang di peroleh melalui pelatihan dan pengalaman kerja (Wati et al., 2014).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal pemerintah tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut (Mulyadi, 1993).

Sistem pengendalian intern yang dijalankan dengan baik akan membantu mengurangi agency problem dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi. Secara konsep pelaksanaan pengendalian intern diharapkan agar proses pemerintahan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Menurut *Stewardship theory* pemerintah layak dipercaya untuk bertindak dengan cara terbaiknya sebagai pelayan kepada masyarakat. Ketika pemerintah menempatkan diri sebagai agen yang baik maka landasan yang kokoh bagi pengelolaan keuangan Negara sudah tentu tercipta dalam rangka mewujudkan tercapainya prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (PP 60/2008) di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun *good governance* (Haelin, 2020).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Wati et al., (2014) laporan keuangan adalah alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Menurut PP No.71/2010, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya sebagai kebutuhan sesama pengguna laporan keuangan pemerintah. Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu penyajian laporan keuangan disajikan dengan keadaan sebenarnya bebas dari kata menyesatkan, bersifat netral. Dapat dibandingkan antar periode ataupun antar entitas. Kemudian dapat dipahami yaitu dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna (Armeli et al., 2017).

3. Metode Penelitian

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti dan mempunyai karakteristik yang sama (Creswell, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di Dinas dan Badan Pemerintahan Kota Bima

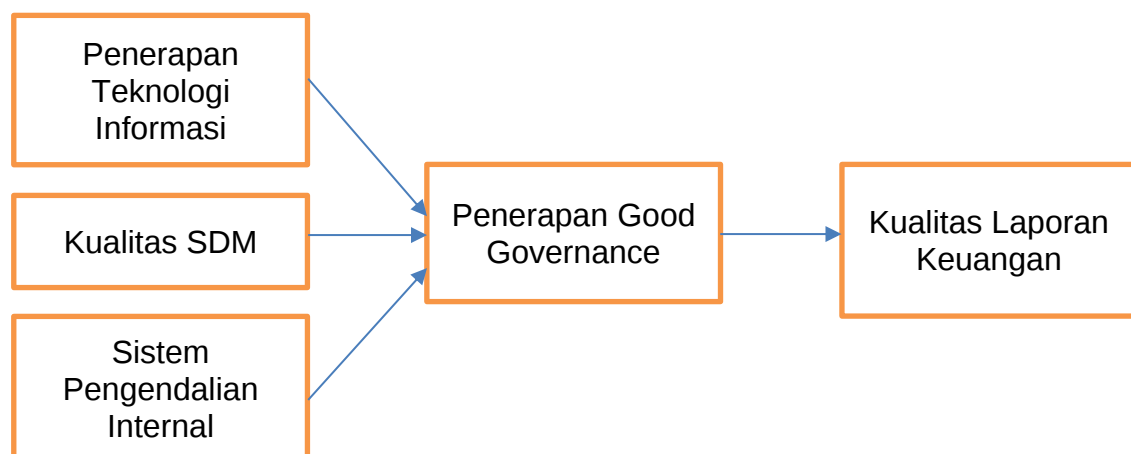
sebanyak 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peneliti menggunakan *Judgement Sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) dalam menentukan sampel, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah seluruh unsur pimpinan masing-masing SKPD Kota Bima, dengan pertimbangan berkaitan langsung dengan penyusun kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 102 responden dengan tiap dinas terdiri dari 3 responden yaitu Kepala Dinas, bagian keuangan.

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari sumber yang asli. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner pada pegawai SKPD Kota Bima. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Creswell, 2016). Penelitian ini menggunakan skala *likers* sebagai skala pengukuran dengan indikator interval 1 sampai 6. Skala yang menjelaskan tingkat persepsi tidak setuju terhadap pernyataan ditunjukkan dengan mulai dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), dan agak tidak setuju (3). Sebaliknya, skala 4 sampai 6 menjelaskan tingkat persepsi setuju terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, mulai dari agak setuju (4), setuju (5), dan sangat setuju (6).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Metode statistik yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Partial least Square merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi (Juliandi, 2018). Sebagai teknik analisis data, PLS menggunakan software SmartPLS versi 2.0.M3. Model dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

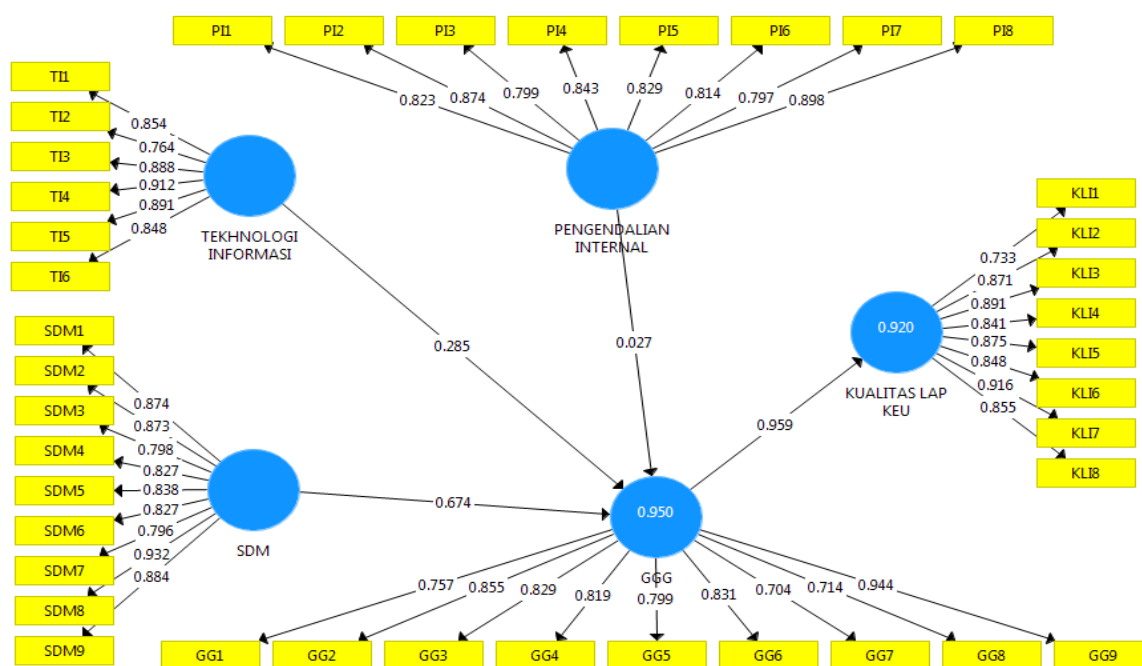
4.1. Hasil Penelitian

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian *Convergent Validity*

Parameter yang digunakan untuk menguji *convergent validity* adalah dengan memeriksa nilai *factor Loading*. Hasil uji validasi yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh indicator pada setiap konstruk dalam model pengukuran telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari nilai *loading factor* yang dimiliki oleh setiap indicator dari masing-masing variabel yang semuanya berada di atas 0,7 ($>0,7$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indicator pada variabel-variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi *convergent validity*.

Hasil pengukuran *Outer model* dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Evaluasi Model (*Outer Model*)

Discriminant Validity

Discriminant validity dengan indikator reflektif dapat diuji dengan memeriksa nilai korelasi *cross loading*, di mana nilai korelasi antara variabel laten dengan indikatornya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten lainnya. Pengujian *discriminant validity* dengan indikator reflektif dilakukan dengan melihat *cross loading* untuk setiap variabel yang seharusnya lebih dari 0,7. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *cross loading* untuk setiap indikator telah melebihi 0,7.

Composite Reliability

Composite reliability digunakan untuk mengukur sejauh mana alat pengukuran memiliki akurasi dan konsistensi dalam pengukuran dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrument ditentukan berdasarkan nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang keduanya harus memiliki nilai lebih besar dari 0.70.

Tabel 1. *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
----------	------------------------------	-----------------------	------------

Penerapan Teknologi Informasi	0,945	0,929	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,959	0,952	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,949	0,938	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,956	0,947	Reliabel
Penerapan <i>Good governance</i>	0,944	0,933	Reliabel

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model dievaluasi dengan menggunakan nilai *R Square* untuk konstruk laten endogen, yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel eksogen dapat menjelaskan varians pada variabel endogen. Nilai *R Square* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)	
Konstruk	R^2
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,950
Kualitas Laporan Keuangan	0,920

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R^2 untuk nilai konstruk laten Penerapan *Good Governance* 0,950 yang berarti bahwa variable Penerapan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Penerapan *Good Governance* sebesar 95% sementara 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk nilai konstruk laten Kualitas Laporan Keuangan 0.920 yang berarti bahwa variable Penerapan *Good Governance* mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 92% sementara sisanya 8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis

Evaluasi model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel/konstruk laten. Hubungan yang dihipotesiskan dalam penelitian ini yaitu pengaruh antara Penerapan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Interen terhadap Penerapan *Good Governance* dan pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Untuk menguji hipotesis digunakan nilai yang ada pada hasil *estimate for path coefficients* (nilai koefisien jalur) yaitu nilai *t* statistik dibandingkan dengan nilai *t*-tabel. Hipotesis akan diterima apabila *p values* < 0,05. Hasil analisis *estimate for path coefficients* (nilai koefisien jalur) pada dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3 Nilai <i>Path Coefficients</i>						
Variabel/Konstruk			<i>Original Sample (O)</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
Penerapan TI	→	Penerapan GGG	0,285	2,212	0,027	Signifikan / diterima
Kualitas SDM	→	Penerapan GGG	0,674	2,899	0,004	Signifikan / diterima
SPI → Penerapan		GGG	0,429	4,021	0,000	Signifikan / diterima
Penerapan GGG	→	Kualitas Laporan Keuangan	0,959	54,819	0,000	Signifikan / diterima

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel Teknologi Informasi (TI) memiliki nilai $p \text{ values } 0,027 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan TI berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pada pemerintah Kota Bima.
- b. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki nilai $p \text{ values } 0,004 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pada pemerintah Kota Bima.
- c. Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki nilai $p \text{ values } 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan TI berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pada pemerintah Kota Bima.
- d. Variabel Penerapan *Good Governance* (GGG) memiliki nilai $p \text{ values } 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan GGG berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Bima.

4.2. Pembahasan

Penerapan Teknologi Informasi dan Penerapan Good Governance

Berdasarkan evaluasi model structural yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap Penerapan GGG pada pemerintahan di Kota Bima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan teknologi informasi pada SKPD yang ada di Kota Bima, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap penerapan Good Governance. Sehingga keberadaan teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Farnita & Junaidi, 2020).

Penerapan teknologi informasi yang baik dapat dilihat dari seluruh SKPD yang ada di Kota Bima telah menggunakan system terkomputerisasi dari mulai proses pelayanan hingga pelaporan. Sejak 2023 seluruh pegawai pada SKPD yang ada di Kota Bima diwajibkan melaporkan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja. Selain itu dalam proses memberikan pelayanan publik yang optimal dan transparan untuk masyarakat pemanfaatan TI telah dilakukan, seperti proses pengurusan ijin usaha, maupun system pendaftaran poli rumah sakit berbasis online. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Farmaningrum (2015) dan Farnita & Junaidi (2020) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan good governance.

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Good Governance

Berdasarkan evaluasi model structural yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap Penerapan GGG pada pemerintahan di Kota Bima. Hal ini disebabkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (GGG) akan terlaksana apabila sumber daya manusia yaitu aparatur negaranya bersih, beribawa, profesional dan bertanggung jawab. Karena semakin baik dan memadai kehandalan aparatur, maka akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi GGG (Segara, 2017).

Setiap tahun seluruh SKPD selalu melakukan kegiatan bimtek maupun pelatihan kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Bima dengan tujuan agar kualitas SDM semakin meningkat sehingga dapat memberikan pelayanan

publik yang maksimal. Hal ini dapat dilihat terlihat dari data yang di keluarkan oleh ombudsman pada tahun 2024 Kota Bima meraih penghargaan pelayanan publik kualitas tinggi dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farmaningrum (2015) dan Sari et al. (2017) yang menyatakan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penerapan Good Governance.

Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Governance*

Berdasarkan evaluasi model structural yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa SPI berpengaruh terhadap penerapan GGG pada pemerintah Kota Bima. Dengan adanya system pengendalian intenal yang baik maka tujuan organisasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik dapat tercapai Prabawa et al. (2020). Hal tersebut berarti dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah maka akan terciptanya pemerintah yang baik, efektif dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian sistem pengendalian internal pemerintah sudah rata-rata dilaksanakan di dalam organisasi perangkat daerah. Hal tersebut dilihat dari cukup baiknya aparatur dalam menjalankan 5 pilar dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), yaitu dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang diterapkan dalam organisasinya. Namun, pengaplikasian SPIP harus terus ditingkatkan mengingat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK untuk Kota Bima untuk tahun 2022 dan 2023, masih berada pada skor 3 dimana semakin tinggi skor SPI semakin bagus dan Kota Bima masih memiliki temuan-temuan terkait SPI. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya dukungan dari komitmen aparatur untuk menjalankan pemerintahan sesuai SPI yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2017), Farmaningrum (2015) dan Wafa et al. (2020) yang menyatakan bahwa System Pengendalian berpengaruh terhadap Penerapan Good Governance.

Penerapan *Good Governance* dan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan evaluasi model structural yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan GGG berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah Kota Bima. Semakin baik omplementasi GGG, maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Bahwa apabila Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip GGG dengan maksimal, maka akan menyebabkan Akuntabilitas kinerja Pemerintahan tersebut akan berjalan dengan baik termasuk di dalamnya dan kualitas penyusunan dan penyajian informasi kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak pemerintah kepada kepada publik (Segara, 2017).

Pemerintah Kota Bima telah menerapkan GGG, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat. Selain adanya transparansi, pemerintah telah menganut prinsip akuntabilitas yaitu menetapkan setiap rincian tugas dan tanggungjawab pada masing-masing bidang bahkan individu dan membuat laporan keuangan guna melaporkan segala bentuk transaksi atau kegiatan yang telah

terjadi selama satu periode pelaporan akuntansi. Dengan adanya prinsip ini secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Masitoh et al., (2020) dan Tullah et al., (2018).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* pada pemerintah Kota Bima. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan GGG pemerintah Kota Bima. Hal ini dapat terlihat bahwa seluruh pegawai pada SKPD yang ada di Kota Bima sejak 2023 wajib melaporkan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja. Serta dalam proses memberikan pelayanan publik yang optimal dan transparan untuk masyarakat pemanfaatan TI telah dilakukan, seperti proses pengurusan ijin usaha berbasis online.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh dalam penerapan GGG, hal ini disebabkan setiap tahun pemerintah selalu melaksanakan bimtek maupun pelatihan kepada semua pegawai negeri sipil yang ada di Kota Bima. Sedangkan sistem pengendalian internal juga berpengaruh terhadap penerapan GGG hal ini dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK untuk Kota Bima untuk tahun 2022 dan 2023, masih berada pada skor 3 dimana semakin tinggi skor SPI semakin bagus. Dan penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Bima. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat mengakses langsung laporan keuangan SKPD pada portal BimaKota, serta Kota Bima selama 10 tahun dari tahun 2015-2024 selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas penilaian dan pemeriksaan laporan keuangan.

Referensi

- Armeli, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jurnal FEKOM*, 4(1), 105–119.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Destriyani, V. (2015). Pengaruh Good Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Fekon*, 2(2), 1–15.
- Farmaningrum, E. S. (2015). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total Quality management Terhadap Penerapan Good Governance di Lembaga Amil Zakat. *Journal of Accounting and Investment*, 16(2), 145–154. <https://doi.org/10.18196/JAI-2015.0039>

- Farnita, I., & Junaidi, R. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Komitmen Pelayanan terhadap Good Governance di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 4(1), 39–49.
- Haelin. (2020). Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus) The Application Of Good Governance Principles In The West Nusa Tenggara Provincial Government (Case Study). *Jurnal Bestari*, 01(01), 1–9.
- Haura, G. A., Junita, A., & Meutia, T. (2019). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (spip), pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap good governance dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi Pada SKPK Di Kota Langsa). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(1), 33–52.
- Indriantoro, N & Supomo, B. (2013). Metodologi penelitian bisnis edisi pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Juliandi, A. 2018. *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS*. Batam: Universitas Batam.
- Kalsi, N. S., & Kiran, R. (2015). A strategic framework for good governance through e-governance optimization: A case study of Punjab in India. *Program*, 49(2), 170–204. <https://doi.org/10.1108/PROG-12-2013-0067>
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Masitoh, S., Sarafiah, D., & Apriyanti, E. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2), 18–26. <https://doi.org/10.54526/jes.v5i2.36>
- Muis, M. A. H., Saleh, H. A., & Rusli, A. M. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 7(2), 73–82.
- Mulyadi. (1993). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN
- Mulyati, D. (2012). Manajemen pengembangan Sumber Daya Aparatur Eselon III dalam rangka peningkatan kinerja individu. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Nurmiati. (2017). Efek Moderasi Good Governance Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 230–245.
- Osborne, David and Ted Gaebler, (1992). *Reinventing Governance, How the Eentreprenurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Penguins Books. New York.
- Pituringasih, E., Asmony, T., & Basuki, P. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan usaha kecil menengah dan implikasinya terhadap good governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 2152.
- Prabawa, S., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa) Sigit. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 269–278.

- Rahman, A. (2018). Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Intrans Publishing.
- Sari, F. D., Haryadi, & Arum, E. D. P. (2017). Determinan Implementasi Good Governance Serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja (JAKU)*, 3(1), 1–15.
- Sari, W. N., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 896–910.
- Segara, L. D. (2017). *Analisis Determinan Good Government Governance Serta Implikasinya Pada Kualitas LAKIP*. 5(1), 1261–1276.
- Suharto, A. A. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(3), 67–79.
- Syahara, H., Wibowo, T. J. A., Fauziah, S. S., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4716-4734.
- Tomuka, S. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Jurnal Politico*, 1–15.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (GGG) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat Dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem kuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 2(1).
- Wilson, R, Kent. (2010). *Steward Leadership: Characteristics of The Steward Leader in Christian Nonprofit Organizations". A Dissertation Presented for the Degree of PhD at The University of Aberdeen.*
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>